

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BASIS AKRUAL,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KETERANDALAN LAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NUGRAHA EKATAMA
NIM. 12030113140238

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nugraha Ekatama
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140238
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BASIS AKRUAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KETERANDALAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)**
Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semarang, 10 Mei 2017

Dosen Pembimbing,

(Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.)

NIP. 19741222 200012 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nugraha Ekatama

Nomor Induk Mahasiswa : 12030113140238

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BASIS AKRUAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KETERANDALAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 07 Juni 2017

Tim Penguji

1. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA (.....)
2. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Ak., Ph.D (.....)
3. Andrian Budi Prasetyo, S.E., M.Si., Ak (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nugraha Ekatama, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Mei 2017
Yang membuat pernyataan,

(Nugraha Ekatama)
NIM: 12030113140238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi, adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.

(Ali bin Abi Thalib)

*Mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya.
Kehendak saja tidak cukup, kita harus mewujudkannya dalam aksi.*

(Leonardo da Vinci)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibu dan Bapak tercinta

Adik dan keluarga besar

Seseorang dan sahabat – sahabat tersayang

ABSTRACT

This study aims to examine the reliability of financial statements with case studies on units of regional apparatus in Kotawaringin Barat District. Independent variable in this research consist of 4 variable that is: understanding of accrual basis of government accounting standard, utilization of information technology, internal control system and human resource capacity. The dependent variable in this research is reliability of local financial statement.

This research is a quantitative research using primary data taken directly from sourcanya. this research object is 28 units of work device area (SKPD) in West Kotawaringin regency amounting to 84 Respondents. Respondents in this study are 1 head of sub-division of finance and 2 sub-division of finance staff at each agency. This research uses questionnaires using Likert scale 1-5.

The results showed that the utilization of information technology has no significant positive influence on the reliability of local financial statements. Not influencing the utilization of information technology in Kotawaringin Barat district because most of the regional work units still have problems on the connection or internet network connected to the work unit and lack of computer units in carrying out the task of regional finance, but it is still a lack of knowledge in using the software. While the understanding of accrual basis of government accounting standards, internal control system, and human resource capacity have a significant positive influence on the dependent variable of the reliability of local financial statements on units of regional work units in Kotawaringin Barat regency.

Keywords: understanding of accrual basis of government accounting standard, utilization of information technology, internal control system, human resource capacity, reliability of local financial statement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterandalan laporan keuangan dengan studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu: pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu keterandalan laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diambil langsung dari sumbernya. Objek penelitian ini yaitu 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berjumlah 84 Responden. Responden pada penelitian ini yaitu satu kepala sub bagian keuangan dan dua staf sub bagian keuangan pada setiap instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert 1-5.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan sebagian besar satuan kerja perangkat daerah masih terdapat permasalahan pada koneksi atau jaringan internet yang terhubung pada unit kerja serta kekurangan unit komputer dalam menjalankan tugas bidang keuangan daerah, selain itu masih kurangnya pengetahuan dalam menggunakan perangkat lunak (*software*). Sedangkan pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual, sistem pengendalian intern, dan kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen keterandalan laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kata kunci: pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia, keterandalan laporan keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)”**. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seseorang yang harus dijadikan panutan umat manusia karena keteladanannya yang luar biasa.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Skripsi ini juga menjadi wujud syukur penulis atas ilmu yang telah didapatkan hingga saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis banyak menemui rintangan dan hambatan. Namun, alhamdulillah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik juga berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada,

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. Selaku wali dosen selama perkuliahan.
3. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.. yang telah berkenan dan sabar menjadi pembimbing skripsi hingga ke titik akhir.
5. Ibu dan Bapak dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat selama menempuh pendidikan sarjana.
6. Segenap karyawan tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Ibu Laili Rosidah dan Bapak Purwanto, yang senantiasa memberikan kasih sayang, kesabaran, kepercayaan, dukungan, nasihat, dan do'a yang tidak pernah berhenti kepada penulis
8. Adik tercinta Muhammad Haikal yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Filza B. E., yang telah memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada kolega selama masa kuliah yaitu Bagir, Fiki, Fahmi, Ardi, Rizky A., Akbar Y., C. J. Michael, Rozi dan Fendra.
12. Teman – teman satu bimbingan yaitu Fadhil, Sofyan, Dea, Elma dan Suci.
13. Teman – teman strata satu jurusan akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat selama masa perkuliahan.

14. Teman – teman Kos Tirto Husodo Timur III No.10 B yaitu, Mas Fajar dan Shahab.
15. Teman – teman masa KKN yaitu, Izzaka, Rowina, Suha, Darus, Firda, Sacra dan Anggra.
16. Teman – teman INSANI bidang HRD yaitu, Wawan, Prana, Ressay, Rilo, Hendri, Lirih, Aprisa, Laina, dan Iffa yang memberikan dukungan dan semangat selama menyusun skripsi.
17. Terima kasih untuk seluruh pegawai bidang keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersedia membantu dalam penyusunan skripsi ini.
18. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah yang sesuai dengan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun semoga dapat melengkapi dan menjadikan penelitian selanjutnya lebih baik.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini karena berbagai keterbatasan dan ketidaktahuan penulis. Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Semarang, 10 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	20
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	20
1.4 Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	23
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	23
2.1.1 Landasan Teori.....	23
2.1.1.1 Teori Kepentingan Publik (<i>Public Interest Theory</i>).....	23
2.1.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>).....	24
2.1.1.3 Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>).....	26
2.1.1.4 Perangkat Daerah.....	27
2.1.1.5 Pemerintah Daerah.....	29
2.1.1.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	30
2.1.1.7 Nilai Informasi Keterandalan.....	31
2.1.1.8 Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua.....	32
2.1.1.9 Teknologi Informasi.....	38
2.1.1.10 Sumber Daya Manusia.....	39
2.1.1.11 Sistem Pengendalian Intern.....	41
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Berpikir.....	45

2.4 Pengembangan Hipotesis.....	48
2.4.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis AkruaI (PSAPBA) terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	48
2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	49
2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Keterandalan Laporan Laporan Daerah.....	51
2.4.4 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia (KSDM) terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	52
2.4.5 Pengaruh PSAPBA, PTI, SPI dan KSDM Secara Simultan terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	55
BAB III METODOLOGI.....	57
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	57
3.1.1 Variabel Penelitian.....	57
3.1.1.1 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	57
3.1.1.2 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	57
3.1.2 Definsi Operasional.....	58
3.1.2.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis AkruaI.....	58
3.1.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	60
3.1.2.3 Sistem Pengendalian Intern.....	61
3.1.2.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	63
3.1.2.5 Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	65
3.2 Populasi dan Sampel.....	66
3.2.1 Populasi.....	66
3.2.2 Sampel.....	67
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	70
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	70
3.5 Metode Analisis Data.....	70
3.5.1 Uji Kompetensi Data.....	71
3.5.1.1 Uji Validitas.....	71
3.5.1.2 Uji Reliabilitas.....	72
3.5.2 Mengolah Data.....	73
3.5.2.1 Analisis Data Deskriptif.....	73
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	73
3.5.3.1 Uji Multikolinearitas.....	73
3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	74
3.5.3.3 Uji Normalitas.....	74
3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	75

3.5.5 Uji Goodness of fit.....	76
3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76
3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	77
3.5.5.3 Uji Statistik t.....	77
BAB IV PEMBAHASAN.....	78
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	78
4.2 Analisis Data.....	81
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	82
4.2.2 Uji Validitas.....	84
4.2.3 Uji Reliabilitas.....	93
4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	97
4.2.4.1 Uji Multikolinearitas.....	97
4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	99
4.2.4.3 Uji Normalitas.....	100
4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	102
4.2.6 Uji <i>Goodness of fit</i>	104
4.2.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	104
4.2.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	106
4.2.6.3 Uji Statistik t.....	107
4.3 Pembahasan.....	109
4.3.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua (PSABA) Berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	109
4.3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) Berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	111
4.3.3 Sistem Pengendalian Intern (SPI) Berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	112
4.3.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia (KSDM) Berpengaruh terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	113
4.3.5 Pengaruh PSAPBA, PTI, SPI dan KSDM Secara Simultan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	117
5.3 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Komponen – Komponen Basis Laporan Keuangan Pemerintah.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Temuan Pemeriksaan, LHP dan Rekomendasi untuk Semester II tahun 2016.....	9
Tabel 1.3 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2011 – 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.....	12
Tabel 1.4 Pemeriksaan oleh BPK Untuk Hasil Rekapitulasi Pemerintah Daerah dan BUMD tahun 2016.....	15
Tabel 2.1 Klasifikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	31
Tabel 2.2 Format Neraca.....	34
Tabel 2.3 Format Laporan Realisasi Anggaran.....	35
Tabel 2.4 Format Laporan Perubahan Ekuitas.....	36
Tabel 2.5 Format Laporan Operasional.....	37
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Daftar Persebaran Kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	68
Tabel 4.1 Daftar Penyebaran Kuesioner.....	78
Tabel 4.2 Karakteristik Responden (N=84).....	80
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	83
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua.....	85
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	86
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	86
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	87
Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	87
Tabel 4.9 Uji Validitas dengan KMO and Bartlett’s Test Untuk Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua.....	88
Tabel 4.10 Uji Validitas dengan KMO and Bartlett’s Test Untuk Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	88
Tabel 4.11 Uji Validitas dengan KMO and Bartlett’s Test Untuk Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	88
Tabel 4.12 Uji Validitas dengan KMO and Bartlett’s Test Untuk Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	89
Tabel 4.13 Uji Validitas dengan KMO and Bartlett’s Test Untuk Variabel Keterandalan Laporan Keuangan Daerah.....	89
Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua.....	94

Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	94
Tabel 4.16 Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	95
Tabel 4.17 Uji Reliabilitas Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	95
Tabel 4.18 Uji Reliabilitas Variabel Keterandalan Laporan Keuangan Daerah...	95
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinearitas.....	98
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas.....	101
Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	102
Tabel 4.22 Hasil Uji Determinasi.....	105
Tabel 4.23 Hasil Uji Statistik F.....	106
Tabel 4.24 Hasil Uji Statistik t.....	107
Tabel 4.25 Ringkasan Hasil Hipotesis.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir.....	47
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	99
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	101

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Perkembangan Opini LKPD tahun 2011 – 2015.....	11
Grafik 1.2 Opini LKPD tahun 2011 – 2015 Pada Tingkat Pemerintah Daerah...	11

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	125
Lampiran B Hasil Rekapitulasi Kuesioner Yang Lulus Uji Validitas.....	134
Lampiran C Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	149
Lampiran D Hasil Uji Asumsi Klasik dan Hipotesis.....	153
Lampiran E Dokumentasi Foto.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sebelum reformasi, pemerintah mengelola keuangan daerah merujuk pada Undang – Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintah Daerah yang dibagi menjadi daerah tingkat I adalah provinsi dan tingkat II ialah kotamadya atau kabupaten. Selanjutnya, di zaman reformasi sekitar tahun 1999 – 2004, pemerintah pusat pada tahun tersebut menerapkan otonomi daerah, serta merilis Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Era reformasi lanjutan sekitar tahun 2004 - sekarang, pemerintah pusat telah melakukan amandemen terhadap peraturan UU sebelumnya yang menghasilkan UU baru seperti, Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Halim dan Kusufi, 2014).

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk dilakukan akuntabilitas dan transparansi publik oleh berbagai lembaga sektor publik, maka semakin meningkat pula perkembangan akuntansi sektor publik. Pada akuntansi sektor publik memiliki kaitan terhadap penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain politik meliputi badan – badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik

negara seperti BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, universitas dan organisasi nirlaba lainnya (Halim, 2007).

Menurut Kawedar (2008), menyatakan bahwa dalam merumuskan suatu konsep terhadap penyajian dan penyusunan suatu laporan keuangan pemerintah daerah/pusat, tidak bisa dilepaskan dengan tujuan kerangka konseptual yang dijadikan sebagai acuan, tujuan tersebut meliputi:

- Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Mengatasi permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar lewat penyusunan laporan keuangan;
- Memberikan suatu pendapat dalam pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Menafsirkan informasi laporan keuangan oleh para pengguna.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik dalam menentukan suatu nilai dari informasi laporan keuangan yang berkualitas yaitu :

1) Relevan

Jika informasi dalam laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan pengguna (*user*), maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan. Suatu Informasi yang bernilai relevan meliputi ketepatanwaktuan, lengkap, bermanfaat prediktif dan bermanfaat umpan balik.

2) Andal

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila disajikan berdasarkan fakta yang jujur, terbebas dari kesalahan material dan hal – hal yang menyesatkan. Terdapat tiga karakteristik dalam mencapai informasi yang andal seperti, dapat diverifikasi, bersifat netral serta disajikan secara jujur.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang bermanfaat adalah laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Dapat dipahami

Jika pengguna memahami informasi sesuai dengan batas kemampuan dan pemahamannya yang terdapat pada laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut bernilai informasi yang dapat dipahami.

Menurut Darise (2008), menyatakan bahwa dilihat dari entitas penyusunan laporan keuangan, akuntansi dibagi menjadi sektor privat dan sektor publik. Akuntansi sektor privat berkaitan dengan perusahaan berbasis bisnis yang berorientasi pada *profit motive*, sedangkan akuntansi sektor publik berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga yang berorientasi pada *nonprofit motive*, sehingga kedudukan akuntansi keuangan daerah berada pada akuntansi sektor publik. Data Akuntansi pemerintahan digunakan untuk menyajikan informasi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi dan kepada pihak seperti, eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

Dalam mengelola keuangan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003, menjelaskan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, selanjutnya dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah (gubernur, bupati, dan walikota) untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam Permendagri No. 64 tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: (1) sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan (2) sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai bendahara umum daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 232 menjelaskan bahwa sistem akuntansi harus dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Menurut Ratmono dan Sholihin (2015:76), menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi menyusun lima jenis laporan keuangan yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selanjutnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) akan melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD sehingga tersusun

7 jenis laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang meliputi; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi/lembaga pada pemerintah daerah, yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah, sedangkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta kinerja, sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Gubernur/bupati/walikota menyiapkan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada presiden melalui menteri keuangan.

Pada tahun 2010 lalu, pemerintah telah merubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), selanjutnya diterapkan dalam lingkungan pemerintahan selambat – lambat nya tahun 2014, yaitu meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, maka menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik dan meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih akuntabel dan transparan, yang mana penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan praktik terbaik dalam tingkat internasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penerapan sistem standar akuntansi pemerintah basis akrual telah memiliki landasan hukum dalam menerapkan basis tersebut, sehingga harus didasarkan pula dengan pemahaman yang memadai baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tabel 1.1 terdapat perbedaan mengenai komponen –

komponen Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.

Tabel 1.1
Perbedaan Komponen – Komponen Basis Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan	
Basis Akrua (UU No. 71 Tahun 2010)	Basis Kas Menuju Akrua (UU No.24 Tahun 2005)
Neraca	Neraca
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	-
Laporan Operasional (LO)	-
Laporan Perubahan SAL	-

Sumber : UU No.71 Tahun 2010 dan UU No.24 Tahun 2005

Menurut Bastian (2006), menyatakan bahwa penerapan basis akrual pada manajemen pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara berbeda dibandingkan institusi atau lembaga publik yang lain. Pada beberapa negara, pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi perusahaan yang berbasis akrual secara penuh, dikarenakan penerapannya yang sederhana dan mudah. Penerapan basis akrual ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang cukup dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan, apabila pemahaman tersebut masih rendah. Maka akan berdampak pada penurunan nilai informasi laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kirayanti dan Erawati (2016), menjelaskan bahwa dasar dari pemikiran terkait dengan pemahaman aturan/regulasi yang tidak penuh, mengindikasikan adanya penerapan aturan yang cenderung menggunakan naluri ketimbang aturan yang berlaku. Menurut Tickell (dalam Kiranayanti dan Erawati, 2016) rendahnya

pengetahuan dasar terkait dengan pemahaman, menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah basis akrual di Fiji.

Menurut Simanjuntak (dalam Halim dan Kusufi, 2014 : 218) menyatakan bahwa penyusunan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) didasarkan pada standar internasional, serta KSAP selaku dewan/komite yang memiliki wewenang terhadap penyusunan PSAP yang implementasinya berdasarkan pada :

- Financial Accounting Standard Boards (FASB);
- Governmental Accounting Standard Boards (GASB);
- International Accounting Standards Committee (IASC);
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- International Federation of Accountants (IFA);
- International Monetary Fund (IMF);
- Peraturan – peraturan bidang keuangan negara yang ada di pemerintahan indonesia;
- Organisasi profesi lainnya yang berkaitan dengan audit dan pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan.

Menurut Bawono dan Novelsyah (2012), menyatakan bahwa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku badan yang bebas dan mandiri mempunyai tanggungjawab dalam mengaudit atau memeriksa pengelolaan keuangan negara (daerah). Untuk mengukur laporan pertanggungjawaban yang disajikan pemerintah, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan sebuah opini sesuai dengan fakta, peraturan dan perundang – undangan yang telah ditetapkan.

Peraturan perundang – undangan mengenai tugas BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) antara lain, Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam setiap semester, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyusun temuan dan pemeriksaannya pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Penyusunan tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 18, Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004.

Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2016, terdapat ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk semester II tahun 2016. Pada pemerintah pusat menghasilkan 81 LHP dengan persentase sebesar 13%, dan pada pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghasilkan 489 LHP dengan persentase sebesar 81%. Untuk lebih lanjut, temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK pada semester II tahun 2016 tersaji pada tabel 1.2.

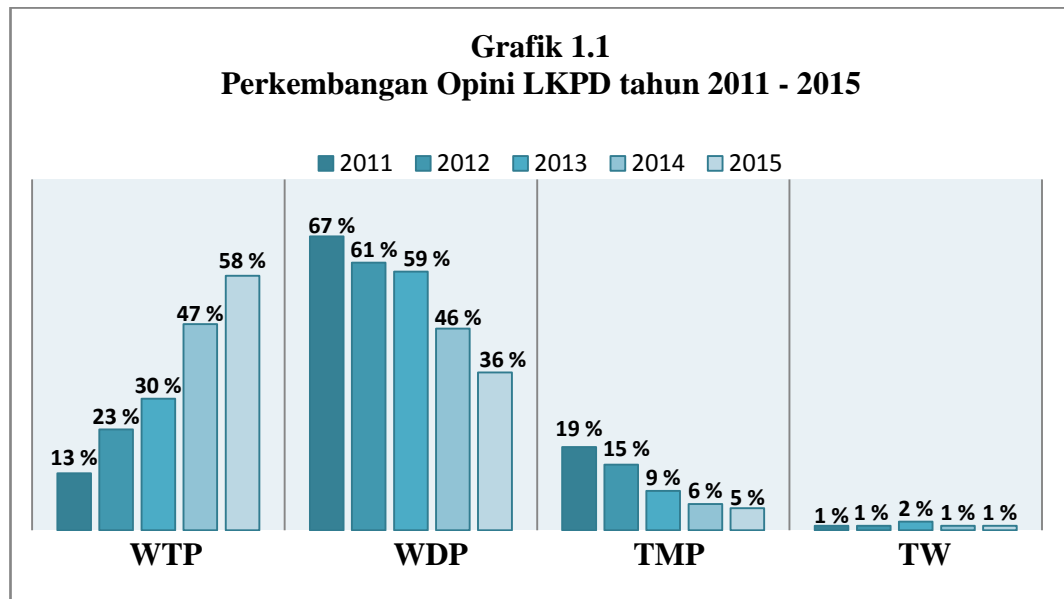
Tabel 1.2
Jumlah Temuan Pemeriksaan, LHP dan Rekomendasi untuk Semester II tahun 2016

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	877	81	2.253
- Pemeriksaan Kinerja	384	39	922
- PDTT	493	42	1.331
Pemerintah Daerah & BUMD	4.520	489	11.667
- Pemeriksaan Keuangan	152	9	399
- Pemeriksaan Kinerja	2.564	268	6.422
- PDTT	1.804	212	4.846

Sumber : www.bpk.go.id – IHPS II tahun 2016

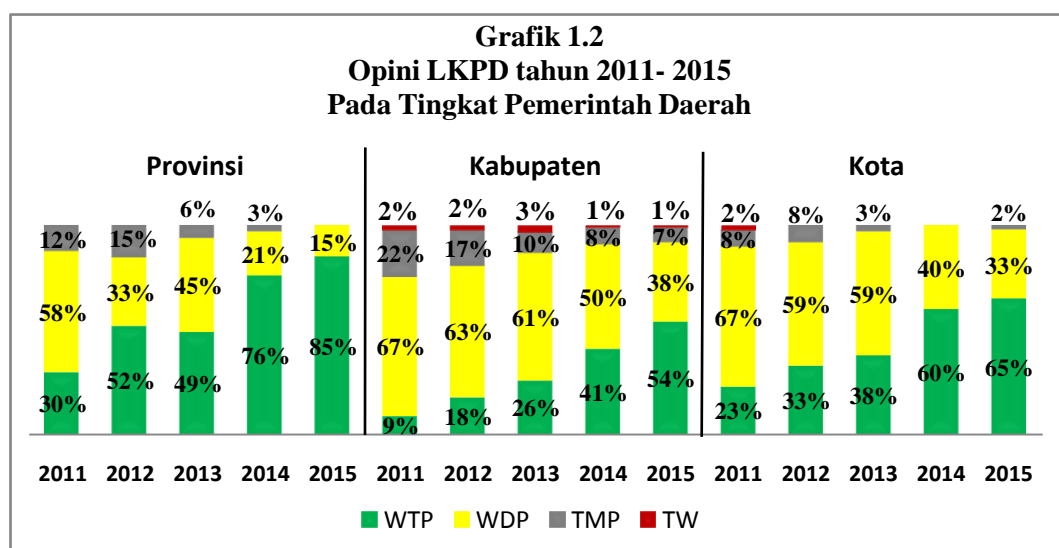
Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan opini/pendapat terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Opini laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan salah satu tolak ukur yang mendasar dalam pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual. Jika LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) memberikan opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian, maka pemahaman basis akrual dapat dikatakan baik, apabila menghasilkan opini tidak memberikan pendapat bahkan tidak wajar, maka pemahaman basis akrual dapat dikatakan tidak baik.

Opini laporan keuangan pemerintah daerah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir (2011 – 2015), perolehan untuk opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 45 poin persen, yaitu dari 13 % pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011, menjadi 58 % pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Untuk perolehan jumlah LKPD yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat mengalami penurunan sebesar 14 poin persen, dari 19 % pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011, menjadi 5 % pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Pada grafik 1.1 disajikan perkembangan opini selama 5 tahun.



Sumber : www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2016

Pada tingkat pemerintahan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 terdiri dari 34 laporan keuangan pemerintah provinsi, 415 laporan keuangan pemerintah kabupaten dan 93 laporan keuangan pemerintah kota. Grafik 1.2 menyajikan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah yang didasarkan pada tingkat pemerintah dari tahun 2011-2015.



Sumber : www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2016

Peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten juga berdampak pada, peningkatan opini untuk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan tabel 1.3 untuk opini laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.3
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
pada Tahun 2011 – 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Keterangan	Opini				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Provinsi Kalimantan Tengah	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
2	Kabupaten Barito Selatan	TMP	WDP	TMP	WDP	TMP
3	Kabupaten Barito Timur	TMP	TMP	TW	WDP	WDP
4	Kabupaten Barito Utara	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
5	Kabupaten Gunung Mas	WDP	WTP DPP	WDP	WDP	WDP
6	Kabupaten Kapuas	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	Kabupaten Katingan	TMP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
8	Kabupaten Kotawaringin Barat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
9	Kabupaten Kotawaringin Timur	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
10	Kabupaten Lamandau	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP
11	Kabupaten Murung Raya	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Kabupaten Pulang Pisau	TW	TMP	TW	WDP	WTP
13	Kabupaten Seruyan	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
14	Kabupaten Sukamara	WDP	WTP	WTP DPP	WTP	WTP
15	Kota Palangka Raya	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP

Sumber : www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2016

Keterangan :

■	WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
■	WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
■	WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
■	TW	: Tidak Wajar
■	TMP	: Tidak Memberikan Pendapat

Terdapat 15 jenis opini yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan opini wajar dengan pengecualian di tahun 2011 – 2013, selanjutnya opini tersebut meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian di tahun 2014 – 2015. Jika dilihat pada tabel 1.2, menunjukkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki opini yang terbaik dari 12 Kabupaten lainnya untuk tahun 2011 - 2015.

Setiap aspek organisasi dari bisnis, industri, pendidikan dan instansi pemerintah akan tersentuh oleh teknologi informasi untuk mempermudah penyelesaian dalam tugas pekerjaan. Dalam instansi pemerintahan diwajibkan untuk menggunakan teknologi informasi, khususnya sistem informasi keuangan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Pergantian Peraturan Pemerintah ini dilakukan untuk meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang relevan, tepatwaktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kendala dalam penerapan teknologi informasi meliputi, kondisi perangkat keras (*hardware*) yang memerlukan biaya dalam perawatannya, dan kondisi perangkat lunak (*software*) memerlukan biaya yang tidak sedikit dikarenakan membeli secara legal, serta kondisi penggunaannya yaitu sumber daya manusia (*brainware*).

Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membangun sistem pengendalian, yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, mengamankan aset negara, melaporkan pengelolaan

keuangan negara secara andal serta mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan (Rohman, 2009).

Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Terdapat 5 unsur dalam sistem pengendalian intern pada kegiatan instansi tingkat pemerintahan yang meliputi, lingkungan terhadap pengendaliannya, menilai suatu risiko, kegiatan terkait dengan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantuan terkait dengan pengendalian intern.

Dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan daerah, unsur sumber daya manusia merupakan peran utama sebagai penggerak sistem pengendalian intern, memahami standar akuntansi pemerintah basis akrual serta memanfaatkan teknologi informasi. Menurut Tobari (2015), menyatakan bahwa dalam mengembangkan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak dapat dihindari atau *condition sine qua non*, meskipun didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih, tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, maka organisasi khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat berkembang.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), menyatakan bahwa faktor utama belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi disebabkan oleh, kondisi sumber daya manusia yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait pemakaian perangkat lunak dan perangkat keras. Sehingga permasalahan tersebut dapat berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Menurut Soimah (dalam Kiranayanti dan Erawati, 2016), menyatakan bahwa kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami dan melaksanakan ilmu akuntansi dapat berdampak pada laporan keuangan seperti, adanya kesalahan laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan standar yang pemerintah tetapkan, sehingga mengurangi kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Tabel 1.4
Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Untuk Hasil Rekapitulasi Pemerintah Daerah dan BUMD Semester I dan II
tahun 2016

No.	Keterangan	Semester I		Semester II		Total	
		Nilai (Jutaan)	Permasalahan	Nilai (Jutaan)	Permasalahan	Nilai (Jutaan)	Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
1	SPI	-	6.233	-	860		7.093
Akibat dari Ketidapatuhan pada ketentuan undang – undang							
1	Berdasarkan Kerugian	1.230.534,16	2.466	418.454,91	957	1.648.989,52	3.423
2	Berdasarkan Potensi Kerugian	539.734,34	347	1.554.893,28	25	2.094.627,62	372
3	Berdasarkan Kekurangan Penerimaan	811.687,01	916	627.011,49	301	1.438.698,5	1.217
Sub Total 1 (yang berdampak pada finansial)		2.581.955,51	3.729	2.600.359,68	1.513	5.182.315,19	5.242
4	Berdasarkan penyimpangan administrasi	-	2.402	-	397	-	2.799
5	Berdasarkan Ketidakhematan	1.687,36	6	45.736,12	74	47.423,48	80
6	Berdasarkan Ketidakefisienan	-	-	-	1	-	1
7	Berdasarkan Ketidakefektifan	-	2	334.446,86	2.829	334.446,86	2.831
Sub Total 2		1.687,36	2.410	380.182,98	3.301	381.870,34	5711
Total ketidakpatuhan		2.583.642,87	6.139	2.980.542,66	4.814	5.564.185,53	10.953
Total		2.583.642,87	12.372	2.980.542,66	5.674	5.564.185,53	18.046

Sumber : www.bpk.go.id – IHPS I & II Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 6.233 permasalahan, serta ketidakpatuhan pada ketentuan undang – undang dengan total 6.139 permasalahan pada semester I tahun 2016. Selanjutnya, mengalami penurunan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan undang – undang dengan total 860 dan 4.814 pada semester II tahun 2016. Sehingga menghasilkan total 7.093 permasalahan mengenai kelemahan sistem pengendalian intern, serta menghasilkan total 10.953 permasalahan terkait dengan ketidakpatuhan pada semester I dan II tahun 2016.

Permasalahan tersebut dapat berdampak pada keandalan laporan keuangan yang merupakan salah satu karakteristik dari nilai informasi yang digunakan oleh *stakeholder*. Untuk mengurangi peningkatan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan undang – undang, maka diperlukan sistem pengendalian intern yang berkualitas, sumber daya manusia yang kompeten dan memaksimalkan teknologi informasi.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Karmila (2014) terkait dengan pengendalian intern yaitu, masih lemahnya pengendalian intern pemerintah daerah Provinsi Riau. Hal tersebut disebabkan karena, adanya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga masalah tersebut berdampak pada penurunan pengendalian intern pemerintah daerah Provinsi Riau.

Penelitian ini mengacu pada peneliti terdahulu atau yang pernah dilakukan oleh, Indriasari dan Nahartyo (2008), Sembiring (2013), Karmila (2014), Aini

(2015), Ramadhan (2016), Kiranayanti dan Erawati (2016) serta Muzzaki (2016) terkait dengan variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat tiga hal dalam penelitian ini yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Pertama, ada penambahan satu variabel independen yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual. Penambahan variabel tersebut dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk meneliti pengaruhnya terhadap keterandalan laporan keuangan daerah. Kedua, terdapat penambahan item kuesioner untuk variabel keterandalan laporan keuangan daerah, yang merujuk pada pelaksanaan standar akuntansi pemerintah basis akrual, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 serta Permendagri No. 64 tahun 2013. Ketiga, penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Kotawaringin Barat yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada Provinsi Bali, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Jawa Tengah. Seperti penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Kiranayanti dan Erawati pada tahun 2016 di Provinsi Bali, Sembiring pada tahun 2013 di Kota Padang, Ramadhan pada tahun 2016 di Kabupaten Batang, Muzzaki pada tahun 2016 di Kabupaten Bondowoso, Indriasari dan Nahartyo pada tahun 2008 di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, Karmila pada tahun 2014 di Provinsi Riau, dan Aini pada tahun 2015 di Kota Payakumbuh.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan objek dari penelitian ini, telah berhasil dalam mendapatkan opini

wajar tanpa pengecualian untuk LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2015 yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah, berbeda dengan kabupaten – kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sehingga hal tersebut menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut maupun penelitian. Berikut merupakan salah satu pemberitaan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah disajikan.

- *Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Endang Tuti Kardiani telah menyerahkan hasil berupa laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Dr. H Ujang Iskandar, ST, M.Si selaku Bupati Kotawaringin Barat di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah. Ujang Iskandar menyatakan dalam mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) membutuhkan waktu sekitar dua periode jabatannya atau kurang lebih 8,5 tahun. Dia menganggap dengan kerja keras tata kelola keuangan ini, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan penilaian yang tertinggi dari 13 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. (antarakalteng.com 19 Juni 2015).*
- *Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester pertama 2015, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mencapai persentase tertinggi se-Kalimantan Tengah (Kalteng). Yakni sebesar 97,14% dan berhasil mengalahkan 13 kabupaten dan kota se-Kalteng. Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Inspektorat Kabupaten Kobar dinilai layak menerima anugerah penghargaan dari BPK Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng). Penghargaan ini dianggap sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. (borneonews.com 4 Juni 2015).*

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan, maka penelitian dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terletak pada Provinsi Kalimantan Tengah, dengan judul penelitian : “PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BASIS AKRUAL, PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KETERANDALAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan daerah yang andal dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya. Berdasarkan penjelasan yang tertuang pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan yang meliputi:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
4. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
5. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap keterandalan

laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang tertuang pada bagian latar belakang dan rumusan masalah, maka timbulah suatu tujuan penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menganalisis pemahaman standar akuntansi pemerintah basis akrual yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap keterandalan laporan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menganalisis pemanfaatan teknologi informasi yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap keterandalan laporan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menganalisis sistem pengendalian intern yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap keterandalan laporan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menganalisis kapasitas sumber daya manusia yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap keterandalan laporan keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berkualitas adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya ataupun yang berkecimpung dalam sektor akuntansi pemerintahan. Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini jika ditinjau dari aspek teoritis, dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis nilai informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini jika ditinjau dari aspek praktis dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai referensi dalam meningkatkan nilai informasi keterandalan laporan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.